

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Fungsi Komisi Pemilihan Umum; Studi KPU Kabupaten Sumenep

Ali Armadi

STKIP PGRI Sumenep

Jl. Trunojoyo, Gedung Barat, Sumenep Madura

Korespondensi penulis: aliarmadi@stkipgrisumenep.ac.id

Abstract

This research aims to determine how the General Election Commission implements its duties and functions to increase community political participation in Sumenep Regency. This type of research uses a qualitative descriptive method to provide an overview of implementing the duties and functions of the General Election Commission in increasing community political participation in Sumenep Regency. The researcher interviewed seven people. This research uses three data collection techniques: observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis uses data reduction, data presentation, and conclusion. The research results show that implementing the duties and functions of the General Election Commission to increase community political participation in Sumenep Regency is exemplary. Based on the facts and realities in the field, community participation in the simultaneous elections in Sumenep Regency has increased dramatically.

Keywords: *Community participation, general election commission, democracy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kab. Sumenep. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kab. Sumenep dimana peneliti mewawancarai 7 orang. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kab. Sumenep sudah baik. Berdasarkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak di Kab. Sumenep sangat meningkat.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Komisi pemilihan umum, Demokrasi.

LATAR BELAKANG

Setiap warga negara mempunyai hak dalam berdemokrasi. Hak tersebut diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa “Pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu (Herdiansah, 2017). Lembaga komisi pemilihan umum memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi pemilihan umum bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun sesuai dengan kaitan dari

tugas dan kewenangannya. Untuk membantu agar pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU berjalan lancar, maka dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dan merupakan Badan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui KPU”.

Keberhasilan pemilu ditentukan oleh besarnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya (Pahlevi, 2016). Besarnya partisipasi politik masyarakat ini dipengaruhi oleh kesadaran politik dari masyarakat, dimana kesadaran politik ini terwujud dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara mereka dalam proses pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum (Wibowo, Wardhana, & Nurgiansah, 2022). Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu sangat berpengaruh dalam menentukan pemimpin atau pejabat publik.

Pemilu merupakan salah satu instrumen utama demokrasi yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan pendapat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan (Yanuarti, 2009). Tidaklah heran jika isu tinggi rendahnya angka partisipasi pemilih berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga negara terhadap wakil mereka atau orang yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan. Sebagai salah satu bagian dari berlanjutnya demokrasi, tingkat partisipasi pemilih akan berdampak pada siapa yang akan menjadi pemenang pemilu serta mengatur kehidupan banyak orang (Kartiko, 2009). Oleh sebab itu, sebagian dari negara-negara yang menganut sistem demokrasi termasuk di Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak bisa dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya masyarakat untuk memilih. Berbicara mengenai pemilu di Kab. Sumenep, masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (Juditha, 2019). Berdasarkan hasil observasi penulis ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh berbagai macam persoalan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat, sikap apatis atau sedang sakit dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih berada di luar daerah dan berada di laut (Pardede, 2014). Minimnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dilihat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 jumlah Pemilih hanya 71.74%. Sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun

2020 angka partisipasi masyarakat mencapai 83,38%. Hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilgub tahun 2018 di Aula Kantor KPU Daerah Sumenep diketahui jumlah DPT sebanyak 204,832 suara dan jumlah yang memilih hanya 146,953 suara. Sehubungan dengan hal di atas, pemilihan umum merupakan momentum bagi komisi pemilihan umum untuk dapat berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu (Bachtiar, 2014). Oleh karena itu, KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu harus berupaya untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum yang akan datang. Melihat pentingnya tugas dan fungsi KPU Kab. Sumenep dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat melalui Fungsi KPU dalam di Kab. Sumenep.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kab. sumenep. Design penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi dalam artian untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer berupa seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Informan ialah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Adapun informan penelitian yang terpilih yaitu pihak yang betul-betul mengerti serta mengalami permasalahan penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dengan cara melihat secara langsung tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel penelitian dan melakukan pencatatan atau hasil observasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur, yakni: Reduksi Data ialah yang terdapat di lokasi penelitian dengan jumlah yang cukup banyak, untuk itu kita perlu mencatat secara teliti dan terperinci. Seperti yang telah dikemukakan bahwa makin lama peneliti di lapangan, jumlah data yang

didapatkan akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu harus terus diadakan analisis data melalui reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan pemilih merupakan proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu. Pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui: pemanfaatan jejaring sosial, rumah pintar pemilu serta pembentukan agen atau relawan demokrasi. Dengan dibentuknya pendidikan pemilih ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi politiknya dalam berdemokrasi. Di era globalisasi seperti saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dalam mensosialisasikan pendidikan pemilu maka komisi pemilihan umum memanfaatkan jejaring sosial dalam penyampaian informasi. Melalui pemanfaatan jejaring sosial, segala informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat. Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Tanggapan informan tentang pendidikan pemilih melalui pemanfaatan jejaring sosial. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan ketua komisi pemilihan umum sebagai berikut:

“Kami juga memanfaatkan jejaring sosial dalam penyampaian informasi tentang pemilu kepada masyarakat agar mereka bisa melihat segala informasi yang berkaitan tentang pemilu.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kab. sumenep telah memanfaatkan jejaring sosial dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemilihan umum kepada khalayak dengan tujuan agar semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang berkaitan tentang pemilu. Untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan melalui pemanfaatan jejaring sosial maka dilakukan wawancara dengan Ketua KPU Kab. sumenep yaitu:

“Informasi yang kami sampaikan melalui media sosial seperti jadwal penyelenggaraan pemilu, jumlah kandidat yang mencalonkan, pentingnya pemilu, dan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pemilu.”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kab. sumenep telah memanfaatkan jejaring sosial dalam menyampaikan informasi terkait dengan kepemiluan. Adapun informasi-informasi yang disampaikan melalui media sosial tersebut yaitu tentang jadwal penyelenggaraan pemilu, jumlah kandidat yang akan mencalonkan, pentingnya pemilu,

dan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pemilu agar masyarakat lebih sadar akan haknya sebagai warga negara. Untuk mengetahui siapa yang bertugas untuk menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial maka dilakukan wawancara dengan Ketua KPU Kab. Sumenep yaitu sebagai berikut:

“Kalau soal penyampaian informasi melalui media sosial kami percayakan kepada relawan demokrasi khususnya relawan demokrasi pada kelompok netizen.”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa yang menyebarkan informasi terkait pemilu KPU telah memberikan tugas tersebut kepada relawan demokrasi khususnya pada basis netizen. Untuk mengetahui kapan informasi tersebut disampaikan maka dilakukan wawancara dengan Ketua KPU Kab. Sumenep yaitu:

“Informasi kami sampaikan sekitar satu bulan sebelum pemilu dilaksanakan.”

Berdasarkan hasil wawancara maka disimpulkan bahwa KPU Kab. Sumenep telah menyampaikan informasi melalui media sosial. Informasi tersebut disampaikan sekitar satu bulan sebelum diselenggarakannya pemilu. Rumah pintar pemilu merupakan sebuah wadah yang dibuat oleh komisi pemilihan umum untuk mendekatkan komisi pemilihan umum pada semua tingkatan dengan seluruh stakeholder pemilu dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan hadirnya rumah pintar pemilu ini, diharapkan masyarakat bisa datang berkunjung sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat untuk menjawab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan dibentuknya rumah pintar pemilu yaitu untuk membentuk generasi bangsa menjadi pemilih cerdas, pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada tujuan kesejahteraan masyarakat. Wawancara dengan ketua KPU Kab. Sumenep:

“Rumah pintar pemilu yang dibentuk komisi pemilihan umum Kab. Sumenep sejak tahun 2017 juga membantu dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat karena disini banyak sekali informasi-informasi yang berhubungan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan dibentuknya rumah pintar pemilu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi karena di tempat tersebut banyak informasi-informasi yang berkaitan tentang pemilu sebelumnya sehingga masyarakat tentunya akan lebih memahami dan sadar akan pentingnya suara yang mereka salurkan dalam pemilihan umum. Untuk mengetahui kelompok sasaran yang menjadi target dari pemberian informasi tersebut, maka dilakukan wawancara dengan Ketua KPU Kab. sumenep:

“Dalam pemberian informasi ini kami menyasar seluruh kelompok masyarakat umum yang ada di Kab. Sumenep. Kami sengaja menyasar masyarakat umum karena agar mereka tidak buta akan politik.”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pemberian informasi KPU Kab. sumenep menyasar seluruh segmen masyarakat umum karena dengan menyasar kelompok tersebut baik yang belum bersyarat atau yang sudah bersyarat menjadi pemilih dapat memberikan pemahaman-pemahaman sejak dini kepada masyarakat agar nantinya ketika mereka telah bersyarat menjadi pemilih mereka akan menggunakan hak suaranya dengan benar.

Relawan demokrasi yang dimaksud adalah kesukarelaan dari pemilih untuk mencerdaskan pemilih dan terlibat dalam proses demokratisasi. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda pendidikan pemilih. Untuk mengetahui informasi apa saja yang telah disampaikan relawan demokrasi kepada masyarakat agar masyarakat ingin berpartisipasi dalam pemilu maka dilakukan wawancara dengan relawan demokrasi:

“Kami melakukan penyuntikan kesadaran pada masyarakat agar mereka lebih mengetahui akan haknya sebagai warga Negara.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maka relawan demokrasi melakukan penyuntikan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat bahwasanya sebagai warga negara yang baik ialah yang mampu menyalurkan suaranya dalam berdemokrasi. Untuk mengetahui apakah informasi telah disampaikan secara menyeluruh di seluruh wilayah yang ada di Kab. Sumenep maka dilakukan wawancara dengan anggota sekretariat KPU Kab. Sumenep selaku Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengemukakan:

“Iya sudah, kami membagi relawan yang berjumlah 55 orang tersebut ke seluruh wilayah kota, pesisir, dan wilayah pinggiran. Jadi, memang dari klasifikasi relawan itu sudah mengakomodir seluruh wilayah di Kab. Sumenep.”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kab. sumenep telah membagi relawan demokrasi yang berjumlah 55 orang tersebut ke seluruh tempat yang ada di Kab. sumenep agar informasi yang disampaikan dapat menyeluruh ke seluruh wilayah khususnya di Kab. sumenep. Hasil wawancara oleh Ketua KPU Kab. sumenep mengemukakan bahwa:

“Kalau saya lihat relawan demokrasi telah melaksanakan sosialisasi secara merata di seluruh tempat.”

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa relawan demokrasi telah melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Sumenep secara merata sehingga tidak ada lagi tempat yang tidak didatangi. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh salah satu anggota relawan demokrasi menyatakan bahwa:

“kami relawan demokrasi telah melakukan sosialisasi seperti di sekolah-sekolah SMA, masjid, dan di setiap Dusun.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa relawan demokrasi melakukan sosialisasi di sekolah tingkat SMA, masjid, dan di setiap Dusun yang ada di Kab. sumenep sehingga informasi yang disampaikan terkait pemilu dapat merata di seluruh tempat yang ada di Kab. sumenep. Tanggapan masyarakat mengenai informasi yang disampaikan oleh relawan demokrasi terkait tentang kepemiluan. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Iya sebelum pemilihan umum dilaksanakan memang ada beberapa relawan demokrasi yang melakukan sosialisasi di masjid dan di setiap Dusun.”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa dari relawan demokrasi telah melakukan sosialisasi tentang kepemiluan kepada masyarakat yang ada di Kab. sumenep. Relawan demokrasi melakukan sosialisasi di masjid dan di setiap Dusun. Hal ini senada dengan wawancara dari salah satu siswa SMA menyatakan bahwa:

“Iya KPU telah melakukan sosialisasi tentang tata cara pemilihan di sekolah SMA, tujuannya supaya kami sebagai siswa yang telah bersyarat untuk memilih bisa mengetahui cara memilih yang benar karena kami ini termasuk pemilih pemula.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak dari KPU Kab. sumenep telah melakukan sosialisasi ke sekolah SMA. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi khususnya kepada pemilih pemula tentang tata cara memilih yang benar agar suara tidak batal. Untuk mengetahui jumlah sosialisasi yang dilakukan relawan demokrasi untuk mensosialisasikan tentang pemilu kepada masyarakat maka dilakukan wawancara dengan salah satu relawan demokrasi yaitu:

“Kami relawan demokrasi hanya melakukan satu kali sosialisasi ke setiap Dusun.”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa relawan demokrasi melakukan sosialisasi di setiap Dusun hanya satu kali saja karena masih banyak tempat yang harus didatangi oleh relawan demokrasi sehingga sosialisasi dilakukan hanya satu kali. Selanjutnya wawancara dengan Ketua KPU Kab. sumenep:

“Sosialisasi yang dilakukan relawan demokrasi hanya satu kali pada setiap Dusun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita hanya melakukan sosialisasi di Kelurahan/Desa saja.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pemilihan agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mengalami peningkatan maka relawan demokrasi melakukan sosialisasi sebanyak satu kali di setiap Dusun yang ada di Kab. Sumenep berbeda dengan sosialisasi yang dilakukan tahun sebelumnya relawan demokrasi hanya melakukan sosialisasi di Kelurahan/Desa saja.

Memberikan informasi yaitu menyampaikan segala informasi yang berkaitan tentang pemilu kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik. Adanya penggunaan media cetak yang digunakan KPU Kab. Sumenep dalam mensosialisasikan informasi yang menyangkut tentang pemilu merupakan hal yang penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Untuk mengetahui jenis media massa cetak yang digunakan oleh komisi pemilihan umum Kab. Sumenep dalam menyampaikan informasi terkait pemilu maka dilakukan wawancara dengan kasubag teknis dan hupmas mengemukakan bahwa:

“Kita menyampaikan informasi melalui media massa cetak seperti, surat kabar, pamflet, surat suara, brosur dan baliho.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pemilu KPU Kab. Sumenep melakukan beberapa penyampaian informasi melalui media cetak seperti surat kabar, pamphlet, surat suara, brosur, dan baliho dengan tujuan agar partisipasi masyarakat di Kab. Sumenep meningkat. Selanjutnya wawancara informan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Iya sebelum diselenggarakannya pemilu memang sudah ada pemasangan seperti baliho-baliho, pamphlet yang telah dipasang di 56 berbagai titik yang ada di Kab. Sumenep. Isi informasinya seperti kapan pemilu dilaksanakan.”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa KPU telah memberikan informasi tentang jadwal penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat melalui baliho dan pamphlet. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengingat dengan baik kapan pemilu dilaksanakan sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu. Selanjutnya wawancara dengan salah satu siswa SMA menyatakan bahwa:

“Iya satu minggu sebelum dilaksanakannya pemilu KPU sudah datang di kampung saya untuk memberikan contoh bagaimana cara memilih yang benar supaya suara tidak batal.”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh KPU melalui surat suara telah dilakukan satu minggu sebelum pemilu dilaksanakan agar masyarakat lebih paham dan mengerti tata cara memilih yang benar. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ketua KPU Kab. Sumenep yaitu:

“Iya satu minggu sebelum pemilu diselenggarakan melawan demokrasi telah kami sebar di seluruh wilayah Sumenep untuk melakukan sosialisasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa KPU Kab. Sumenep juga telah menyampaikan informasi kepada pemilih melalui surat suara dengan tujuan agar masyarakat pemilih pemula dan masyarakat umum dapat mengetahui bagaimana cara memilih yang benar sehingga jumlah surat suara yang batal dapat berkurang. Pemberian informasi tersebut dilakukan satu minggu sebelum pemilu dilaksanakan. Memberikan kesempatan yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemilu baik penyandang disabilitas maupun masyarakat yang bukan disabilitas. Wawancara dengan ketua komisi pemilihan umum:

“Iya kita telah menyampaikannya informasi tentang pelaksanaan pemilu kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumenep. Kita tidak pernah membedakan semuanya rata tanpa ada pengecualian.”

Dari penuturan informan dapat diketahui bahwa komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu telah menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemilu kepada seluruh masyarakat yang ada di Kab. Sumenep tanpa pengecualian baik yang termasuk disabilitas maupun sebaliknya Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai gangguan fisik atau mental karena tidak berfungsinya organ tubuh yang dapat mengakibatkan adanya kesulitan atau hambatan dalam melakukan aktivitas. Namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk tetap melakukan aktivitas sebagaimana manusia yang sempurna. Kedisabilitasan yang disandang penyandang disabilitas, tidak menjadikan hilangnya hak pilih. Berikut hasil wawancara dengan ketua KPU Kab. Sumenep:

“Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga biasa makanya dalam setiap pembuatan TPS akses disabilitas itu disiapkan artinya di lokasi TPS itu tidak menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk datang ke TPS. Untuk mempermudah pencoblosan kami percayakan kepada penyandang disabilitas untuk didampingi dan bagi yang tidak mempunyai pendamping kami percayakan kepada petugas KPPS.”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kab. Sumenep telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. komisi pemilihan umum juga telah memberikan kemudahan ketika melakukan pencoblosan mereka bisa didampingi oleh pendampingnya sendiri. Namun bagi yang tidak memiliki pendamping bisa didampingi oleh KPPS. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh salah satu pegawai sekretariat KPU Kab. Sumenep menyatakan bahwa:

“Jadi pada saat penyusunan data pemilih itu kami sudah mendata penyandang disabilitas sehingga dalam SK penetapan daftar pemilih tetap sudah ada data penyandang disabilitas perkecamatan sampai di TPSnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa terkhusus kepada masyarakat penyandang disabilitas KPU memberikan fasilitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya di TPS. Untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan relawan demokrasi kepada masyarakat penyandang disabilitas terkait tentang pelaksanaan pemilu, maka dilakukan wawancara dengan informan selaku relawan demokrasi yaitu sebagai berikut:

“Informasi yang disampaikan berupa kapan pemilu dilaksanakan, bagaimana cara memilih yang benar, berapa jumlah surat suara beserta warnanya.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa relawan demokrasi telah melakukan penyampaian informasi berupa jadwal pemilihan, cara memilih yang betul, dan telah menjelaskan jumlah surat suara yang akan dipilih beserta warnanya. Hal ini dilakukan supaya tingkat kesalahan dalam pencoblosan dapat diminimalisir. Untuk mengetahui cara penyampaian informasi yang disampaikan relawan demokrasi pada penyandang disabilitas, maka peneliti melakukan wawancara dengan relawan demokrasi yaitu:

“untuk memudahkan kami dalam menyampaikan informasi pada penyandang disabilitas, maka KPU menyediakan penerjemah bahasa isyarat.”

Berdasarkan hasil penuturan dari informan, dapat disimpulkan bahwa agar penyandang disabilitas dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh relawan demokrasi maka pihak dari KPU menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau biasa disebut interpreter.

Pada penelitian ini faktor penghambat merupakan faktor yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan begitu sangat mempengaruhi hasil capaian yang akan diperoleh. Adapun faktor penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kab. Sumenep antara lain: Sumber Daya Finansial Sumber daya finansial memainkan peranan yang sangat penting untuk menggerakkan lembaga atau organisasi dalam suatu kegiatan. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan komisi pemilihan umum Kab. Sumenep dalam hal sosialisasi tentang kepemiluan yaitu sumber daya finansial. Hal ini sesuai wawancara dengan kepala subbagian keuangan, umum dan logistik mengemukakan bahwa:

“Kami hanya terkendala di dana. Karena dalam mensosialisasikan segala informasi tentang pemilu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tetapi meskipun anggarannya terbatas kita tetap bisa melaksanakan sosialisasi tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa KPU Kab. Sumenep mengalami kendala finansial dalam mensosialisasikan informasi-informasi yang berkaitan tentang pemilu kepada pemilih. Dana yang diterima komisi pemilihan umum untuk melakukan sosialisasi tidak sesuai dengan dana yang harus dikeluarkan. Meskipun begitu, KPU Kab. Sumenep tetap melaksanakan sosialisasi sesuai dengan anggaran yang ada. Selanjutnya wawancara dengan Ketua KPU Kab. Sumenep yaitu:

“Memang dalam mensosialisasikan pemilu ini kepada masyarakat kami terkendala di anggaran”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kab. Sumenep mengalami kendala di bagian keuangan dalam mensosialisasikan pemilu ke masyarakat. Sehingga perlu adanya anggaran yang cukup agar sosialisasi yang dilakukan nantinya akan lebih maksimal. Hal ini senada dengan petikan wawancara salah satu anggota pegawai sekretariat selaku Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengemukakan:

“Iya memang anggaran yang diberikan tidak seimbang dengan kegiatan yang kami lakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kab. Sumenep dalam mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan. Cuaca Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kegiatan yang akan kita laksanakan terkadang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kondisi cuaca yang selalu berubah-ubah. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan yang dikatakan oleh salah satu pegawai sekretariat KPU Kab. Sumenep menyatakan bahwa:

“Selain dana kita terkadang juga terkendala oleh cuaca karena ketika kita ingin melakukan sosialisasi terkadang turun hujan sehingga bisa menghambat kami untuk sampai di tempat tujuan.”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sosialisasi tentang kepemiluan kepada masyarakat KPU Kab. Sumenep dalam menyampaikan sosialisai tersebut terkadang tidak berjalan sesuai dengan terget yang telah mereka rencanakan sebelumnya karena kondisi cuaca yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya wawancara dengan informan relawan demokrasi mengemukakan bahwa:

“Biasanya kami relawan demokrasi kadang tidak tepat waktu ke lokasi karena biasa tiba-tiba hujan. Jadi, kami harus menunggu hujan reda terus kita lanjut ke lokasi tujuan.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa relawan demokrasi dalam mensosialisasikan tentang pemilihan kepada masyarakat terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya karena mereka terkendala oleh cuaca. Selanjutnya wawancara dengan masyarakat yaitu:

“Iya memang betul relawan demokrasi waktu melakukan sosialisasi di Dusun saya mereka terlambat datang tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan sebelumnya.”

Berdasarkan petikan wawancara diketahui bahwa relawan demokrasi dalam melakukan sosialisasi terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena cuaca yang tidak mendukung kegiatan tersebut sehingga mereka tidak tepat waktu tiba di tempat tujuan. Aktivitas Masyarakat Aktivitas masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar masyarakat Kab. Sumenep berprofesi sebagai nelayan. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka harus pergi melaut. Kendala yang dihadapi oleh KPU Kab. Sumenep yaitu masyarakat yang pergi melaut tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara oleh Ketua KPU Kab. Sumenep menyatakan bahwa:

“Banyak masyarakat tidak bisa ikut memilih karena pergi ke laut untuk mencari ikan sebagai sumber penghasilannya sehingga mengakibatkan jumlah pemilih berkurang dan menghambat proses sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU terhambat.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa KPU Kab. sumenep mengalami kesulitan ketika ingin melakukan sosialisasi tentang pemilu kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat sedang berada di laut sehingga dalam pemilu masih terdapat masyarakat yang tidak ikut berdemokrasi. wawancara dengan informan relawan demokrasi yaitu sebagai berikut:

“Ketika kami melakukan sosialisasi ada beberapa masyarakat yang tidak ikut di kegiatan tersebut karena mereka ada di laut untuk mencari ikan.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi terkait dengan pemilu hanya diikuti oleh sebagian masyarakat saja karena beberapa masyarakat sedang berada di laut untuk mencari ikan. Sehingga hanya sebagian masyarakat yang ikut dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Wawancara dengan informan masyarakat mengatakan bahwa:

“Iya di kampung saya rata-rata seorang nelayan. Jadi, pada saat pemilu mereka tidak ada di rumah. Mereka pergi melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga mereka lebih memilih tidak ikut dalam pemilu yang jelas mereka bisa mendapatkan uang”.

Hasil petikan wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa masyarakat Kab. Sumenep yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan pokok keluarga yang harus mereka penuhi sehingga mereka lebih memprioritaskan mencari ikan di laut daripada ikut berpartisipasi dalam pemilu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sumenep menyampaikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat dengan melalui media massa cetak dan elektronik. Media massa elektronik yang digunakan seperti televisi, radio dan media sosial (facebook dan twiter). Sedangkan media massa cetak yang digunakan seperti surat kabar, pamflet, surat suara, brosur dan baliho. Adapun jenis informasi yang disampaikan yaitu terkait tentang pengumuman daftar DPT, jadwal kampanye, jadwal pelaksanaan pemilu, bagaimana cara memilih yang benar, jumlah surat suara beserta warnanya, pentingnya pemilu dan penyadaran kepada masyarakat akan haknya sebagai warga negara dalam berdemokrasi. KPU Kab. Sumenep juga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang baik penyandang disabilitas maupun sebaliknya. Terkhusus kepada masyarakat penyandang disabilitas KPU memberikan fasilitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya di TPS serta Komisi pemilihan umum juga telah memberikan kemudahan ketika melakukan pencoblosan mereka bisa didampingi oleh pendampingnya sendiri. Namun bagi yang tidak memiliki pendamping bisa didampingi oleh KPPS.

DAFTAR REFERENSI

- AR, M. M. (2021). Memahami Karakteristik Peserta Didik.
- Ar, M. M., Rofik, R., & Hanafi, A. (2023). Expensive Political Costs in the 2024 Simultaneous Elections. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(1), 01-20.
- AR, M. M. (2017). Implementasi pendidikan multikultural melalui pendekatan nilai luhur budaya dan pancasila untuk membangun karakter mahasiswa dalam meghadapi arus globalisasi. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 1(2), 89-101.
- AR, M. M., Aini, K., & Armadi, A. (2023). KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN BIG BOOK BERBASIS STEAM. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 2894-2902.

- Ar, M. M., & Aini, K. (2023). The Implementation of Ecoliteracy as a Learning Resource to Improve Environmental Care Attitudes in Elementary Schools. In *Elementary School Forum (Mimbar Sekolah Dasar)* (Vol. 10, No. 1, pp. 122-134). Indonesia University of Education. Jl. Mayor Abdurachman No. 211, Sumedang, Jawa Barat, 45322, Indonesia. Web site: <https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbar/index>.
- AR, M. M., & Asmoni, A. (2023, December). IDENTIFIKASI POLA ASUH ORANG TUA PERANTAU KE-JAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI SDN KALIANGET BARAT V SUMENEP MADURA). In *PROSIDING SNAPMA (Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNIPMA)* (Vol. 1, pp. 111-119).
- AR, M. M., & Hardiansyah, F. (2022). Prosocial behavior of elementary school students based on gender differences in society 5.0. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 3(3), 390-396.
- AR, M. M., Rasyid, S. F., & Ridwan, M. (2021). Legacy of heroic values education kh. abdullah sajjad from madura assisted with learning comics for sd/mi students in sumenep. *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 14(1), 79-88.
- AR, M. M., Zainuddin, Z., Aini, K., & Mutia, T. (2022). Analysis of Numeration Literacy Program Implementation In Low Class Learning. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 3134-3137.
- Armadi, A., AR, M. M., & Aini, K. (2022). Training and Coaching Strengthening Character Education Based On School Culture InThe Upper Class Of Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Tamidung Batang-Batang. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 144-151.
- Astuti, Y. P., & AR, M. M. (2023). Implementation of the Campus Teaching Program Batch 3 in Building Scientific Literacy in Elementary Schools. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(7), 5140-5149.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).
- Damayanti, N. P. U. I., AR, M. M., & Aini, K. (2024). KETERKAITAN PEMBELAJARAN RAGAM GEOGRAFIS DAERAH DENGAN DIAGRAM VENN DAN BILANGAN BULAT. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(2), 102-109.
- Hardiansyah, F., & Abuyamin Rasia, M. M. (2022, April). Enhancing Students' Learning Motivation through Changing Seats in Primary School. In *Elementary School Forum (Mimbar Sekolah Dasar)* (Vol. 9, No. 1, pp. 253-268). Indonesia University of Education. Jl. Mayor Abdurachman No. 211, Sumedang, Jawa Barat, 45322, Indonesia. Web site: <https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbar/index>.
- Hidayatillah, Y., Wahdian, A., & Misbahudholam, M. (2022). Peran Sekolah melalui Kegiatan Pembiasaan Terintegrasi Pembelajaran IPS untuk Membangun Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(4), 1422-1433.
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi identitas dalam kompetisi pemilu di Indonesia pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169-183.
- Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 70-84.
- Juditha, C. (2019). Buzzer di media sosial pada pilkada dan pemilu Indonesia. *Seminar*

Nasional Komunikasi Dan Informatika.

- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13–28.
- Ridwan, M., AR, M. M., Budiyono, F., & Sukitman, T. (2023). Improve The Numeracy Skills of Fifth-Grade Students Through Self-Efficacy in Elementary Schools. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 7(3), 526-535.
- Shiddiq, A. (2022). The Foundation's Leadership Strategy for Developing Nurul Mannan Elementary School in West Banjar Gapura Sumenep. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 3094-3097.
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal Signal*, 5(2).
- Zainuddin, Z., AR, M. M., Hidayat, F., & Fadhilah, A. (2021). Penguatan komunikasi orang tua dan guru terhadap perkembangan belajar siswa sekolah dasar. *Prosiding SNAPP*, 119-122.
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi politik pemilih milenial pada pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55–63.